

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total luas wilayah laut mencapai 5,8 juta Km² (Hery Yuniarto, 2023). Hal tersebut telah diakui dunia sebagaimana dalam konvensi hukum laut internasional tahun 1982. Sebagai negara kepulauan terbesar potensi besar atas sumber daya laut dan pesisir dimiliki Indonesia, akan tetapi disisi lain dengan posisi geografis Indonesia, mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap kondisi iklim yang sering kali berubah-ubah khususnya di wilayah pesisir, ini menjadikan kejadian ekstrim seperti kekeringan, abrasi, serta banjir yang kerap kali terjadi.

Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki luas wilayah perairan 6.315.222 km², dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 km², serta jumlah pulau yang bernama dan berkoordinat sebanyak 13.466 pulau. (Kusmana et al., 2014). Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah perairan yang lebih besar jika dibandingkan wilayah daratannya. Semua fenomena yang terjadi di darat maupun di laut, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun alamiah, akan mempengaruhi perubahan lingkungan. Fenomena pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim berdampak terhadap pola hujan, naiknya permukaan air laut, terjadinya badai dan gelombang yang tinggi, serta dampak lainnya yang dapat mengancam kehidupan manusia. Perubahan permukaan air laut dapat menyebabkan dampak negatif berupa abrasi di wilayah pesisir Pantai (Harry Yulianto & Iryani Iryani, 2024).

Pesisir merupakan wilayah yang meliputi wilayah daratan yang masih memperoleh pengaruh dari laut (pasang-surut, suara debur ombak, perembesan air laut di daratan), serta wilayah laut yang masih mendapat pengaruh dari darat (aliran air sungai dan sedimentasi dari darat). Wilayah pesisir memiliki berbagai potensi sumber daya alam seperti: biota laut, terumbu karang, hutan mangrove, pantai berpasir, maupun bahan tambang dan mineral, Wilayah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai tambak, budidaya, kawasan industri, pelabuhan, maupun pusat kegiatan pariwisata. Salah satu permasalahan wilayah pesisir adalah abrasi, sehingga peningkatan laju abrasi dapat menjadi ancaman bagi wilayah pesisir. Abrasi adalah pengikisan daratan akibat aktivitas gelombang, arus maupun pasang surut laut yang dapat menyebabkan berubahnya garis Pantai (Harry Yulianto & Iryani Iryani, 2024).

Salah satu wilayah pantai yang mengalami dampak abrasi yakni kawasan ekowisata Lantebung yang terletak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Permasalahan yang ada di kawasan ekowisata Lantebung yaitu faktor sedimentasi serta sampah pantai. Kawasan ekowisata Lantebung memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang dikunjungi oleh masyarakat untuk menikmati keindahan alam atau mencari sarana hiburan, sehingga beban pencemaran lingkungan meningkat dikarenakan sampah yang berasal dari pengunjung, maupun warga di sekitarnya.

Sampah merupakan limbah yang sulit diuraikan oleh alam, sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan, dan berbahaya bagi kelangsungan hidup makhluk di perairan

Dalam hal ini strategi rehabilitasi ekosistem mangrove, menjadi salah satu Solusi yang efektif dalam mengurangi dampak banjir rob. Hutan mangrove di dunia juga banyak ditemui di Kawasan pesisir negara-negara tropis dan subtropis yang secara geografis terdistribusi pada garis lintang antara 30° LU dan 30° LS (Malik et al., 2019) Indonesia merupakan kawasan mangrove terbesar didunia, berdasarkan peta mangrove nasional pada tahun 2021, kawasan mangrove di Indonesia mencapai luasan sebesar 3.364.080 juta Ha. Luasan tersebut terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu mangrove seluas 3.121.240 Ha atau 92,78% dari total luasan, kemudian mangrove sedang seluas 188.366 (5,60%) dan mangrove jarang seluas 54.474 Ha (1,62%) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022).

Salah satu kawasan di Indonesia yang sering mengalami banjir rob Adalah kota makassar. Kota Makassar memiliki garis pantai 32 Km dan mencakup 11 pulau-pulau kecil diselat Makassar dengan wilayah perairan keseluruhan mencapai 122.370 Ha (Khairul et al., 2023). Lantebung menjadi salah satu wilayah pesisir kota makassar yang mengalami masalah banjir rob dan merobohkan rumah-rumah warga (Suriani Mapong, 2022). Untuk mengurangi dampak potensi banjir rob tersebut dilakukan penanaman kembali hutan mangrove seluas 12 Ha (Khairul et al., 2023) di Lantebung, Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea. Secara umum, mangrove memiliki sistem perakaran khas yang tampak di permukaan, dikenal sebagai akar pernapasan (pneumatofor). Sistem ini merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi tanah yang minim oksigen (anoksik). Jenis tumbuhan ini mampu menyesuaikan diri melalui keberadaan akar udara atau akar tunjang yang menjulang ke atas untuk mengambil oksigen ketika terendam air asin, jaringan akar yang luas untuk menjaga stabilitas serta menahan lumpur atau pasir, dan daun yang mampu berfungsi dengan baik meskipun menghadapi kadar garam tinggi. Akar-akar mangrove membentuk struktur yang kompleks sehingga efektif dalam mencegah abrasi. Ekosistem mangrove juga menyediakan habitat bagi berbagai biota untuk berkembang biak, mencari makan, dan berlindung. Selain itu, mangrove memiliki kemampuan mengakumulasi logam berat dengan menyerap dan menyimpannya pada daun, batang, maupun akar. Keberadaan hutan mangrove berpengaruh terhadap wilayah di sekitarnya melalui interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam habitat mangrove (Arifin Ramadhan, 2024).

Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem pesisir yang memiliki peran vital dalam mendukung kehidupan manusia serta menjaga kestabilan ekosistem lainnya. Mangrove memberikan beragam manfaat, antara lain melindungi wilayah pesisir dari abrasi dan terpaan badai, menjadi sumber daya perikanan, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis organisme. Selain itu, keberadaan hutan mangrove sangat penting bagi masyarakat pesisir. Hutan mangrove memberikan

kontribusi positif secara fisik bagi aktivitas masyarakat pesisir dalam upaya meningkatkan kondisi ekonomi maupun ekologi. Hutan mangrove berfungsi sebagai wilayah pemijahan, tempat asuhan, dan area mencari makan bagi berbagai organisme. Keberadaan fungsi ekologis ini memberikan keuntungan bagi nelayan karena dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka. Dari sisi ekonomi, kawasan mangrove dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata, sarana edukasi, serta dimanfaatkan secara langsung. Dalam hal ini mangrove dengan kondisi yang sehat dapat membantu masyarakat yang bermukim di dekatnya dengan peningkatan sumber daya ekonomi setempat dengan adanya kegiatan terukur seperti penjualan bibit mangrove sebagai sarana edukasi penggiat lingkungan, peningkatan biota, dan pengolahan terpadu seperti obat-obatan tradisional, pewarna alami maupun tepung makanan. Disamping itu, dengan adanya hutan mangrove tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk penambahan ruang terbuka hijau (RTH). RTH di kota Makassar baru seluas 8% dari luas daratan kurang lebih 175,77 Kilometer per segi, sehingga masih dibutuhkan 22% RTH lagi (Chandra, 2022). Dalam hal ini, RTH sendiri merupakan aset penting dalam pengembangan ekowisata.

Wisata sendiri dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 bab I pasal 1 menyebutkan jika wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisata juga dapat berarti sebagai suatu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengandalkan jasa alam untuk kepuasan manusia (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009). Berdasarkan Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, ekowisata merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat (Direktorat et al., 2009).

Ekowisata atau ekoturisme merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal serta aspek pembelajaran. Pengembangan ekowisata akan memberikan manfaat dan keuntungan yang begitu banyak: (Malik & Rahim, 2019)

1. Ekowisata dapat memberikan perlindungan dan pelestarian habitat termasuk flora dan fauna yang ada di dalamnya.
2. Ekowisata dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan kesadaran wisatawan dan masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pelestarian terhadap alam, termasuk mengenai pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan

3. Pengembangan ekowisata memberikan keuntungan dari segi ekonomi karena tidak membutuhkan sarana dan modal/investasi yang besar sebagaimana pariwisata konvensional.
4. Dengan mengutamakan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan ekowisata, hal ini memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan memberi keuntungan ekonomi bagi mereka. Selain itu, penyediaan sarana pangan seperti warung makan disekitaran Kawasan ekowisata oleh masyarakat, juga dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. Nilai-nilai sosial budaya masyarakat termasuk kearifan lokal yang dimiliki akan semakin terjaga, lestari dan dikenal.

Berdasarkan hal tersebut, pemanfaatan hutan mangrove sebagai kawasan ekowisata semakin penting dan berkembang juga di negara-negara Asia Tenggara seperti Kawasan Mangrove di Kuala Selangor Nature Park, Malaysia, Yaring Mangrove Education Center di Pattani, dan Thailand (Malik & Rahim, 2019). Di Indonesia pembangunan dan pengembangan ekowisata diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekowisata di Daerah. Aturan ini secara jelas memberi arah terkait pengelolaan ekowisata di daerah dengan mengedepankan aspek keberlanjutan dan perlunya kolaborasi atau Tindakan bersama dalam proses pengelolaannya (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2010). Di Indonesia upaya penerapan ekowisata mangrove telah banyak berkembang di termasuk salah satunya di Lantebung. Keberadaan hutan mangrove pada wilayah tersebut, dengan akarnya yang kuat serta sistem penyerapan air yang efisien, mampu menahan erosi pantai serta memperkuat struktur pesisir. Melalui ekowisata, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ekosistem mangrove tanpa merusaknya, sehingga terjadi keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Luas hutan mangrove di Lantebung pada tahun 2004 mencapai luas 9,136 hektare, pada tahun 2014 seluas 10,246 hektare dan pada tahun 2024 luas hutan mangrove mencapai 16,390 hektare. Mangrove di Lantebung memiliki tujuh jenis mangrove, terdiri dari tiga jenis mangrove sejati yaitu *Avicennia Marina*, *Avicennia Alba*, dan *Rhizophora Mucronata*, serta empat flora asosiasi yaitu *Acanthus ebracteatus* (jeruju putih), *Sesuvium Portulacastrum* (gelang laut), *Acrostichum Aureum* (paku laut), dan *Hibiscus Tiliaceus* (waru laut). Selain itu, *Rhizophora apiculata* juga ditemukan di kawasan ini. Secara keseluruhan, *Rhizophora mucronata* merupakan spesies mangrove paling dominan di Lantebung, diikuti oleh *Avicennia marina* dan *Avicennia alba*, sementara *Rhizophora apiculata* dan flora asosiasi lainnya ditemukan dalam jumlah lebih sedikit .(Ramadhan,2024)

Table 1 ringkas yang memuat tahun luas dan jenis mangrove di Kawasan Ekowisata Mangrove Lantebung Makassar:

Tahun	Luas Mangrove (Ha)	Jenis mangrove yang ditemukan
2004	9,136	<i>Avicennia marina</i> , <i>Avicennia alba</i> , <i>Rhizophora mucronata</i> , <i>Rhizophora apiculata</i> , <i>Acanthus ebracteatus</i> , <i>Sesuvium portulacastrum</i> , <i>Acrostichum aureum</i> , <i>Hibiscus tiliaceus</i>
2014	10,246	
2024	16,390	

Dalam pengembangannya, kondisi hutan mangrove pada tahun 2004 hingga 2014 mengalami gangguan terutama pada tahun 2010 yang disebabkan adanya kegiatan perseorangan oleh warga setempat yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan sehingga hasil kayu dari pohon mangrove dijual dan dipergunakan untuk bahan bakar pembuatan atap rumah yaitu genteng. Pada tahun 2004 hingga 2014 telah mengalami pertumbuhan atau peningkatan jumlah luas hutan mangrove sebesar 11% karena adanya proses penanaman oleh masyarakat sekitar dan instansi yang mempunyai kegiatan lingkungan terhadap ekosistem mangrove. Faktor lainnya yang mendukung peningkatan jumlah pertumbuhan adalah tempat habitat yang mendukung serta tumbuhnya bibit hidup alami (propagule) yang jatuh dari pohonnya kejadian ini biasa disebut rekrutmen alami sehingga menyebabkan bertambahnya luas hutan (Arifin Ramadhan, 2024).

Lantebung merupakan salah satu Kawasan hutan mangrove yang dijadikan wirausaha di Kota Makassar. Berdasarkan pengembangan wirausaha daerah, Lantebung memiliki potensi yang harus lebih dikembangkan. Salah satunya yaitu Kawasan wirausaha mangrove. Pengembangan ekowisata mangrove di Lantebung juga sejalan dengan regulasi pada peraturan daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Makassar Tahun 2015-2034 mengatur pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, termasuk pengembangan ekowisata mangrove (DPRD, 2022). Dalam peraturan tersebut kawasan mangrove diidentifikasi sebagai bagian dari kawasan lindung yang berfungsi melindungi pantai dari banjir rob dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Pengembangan ekowisata tersebut mendorong pemanfaatan kawasan lindung secara berkelanjutan melalui kegiatan pariwisata berbasis alam. Hal tersebut tidak hanya mendukung konservasi lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Gambar 1 Ekowisata Mangrove lantebung



Sumber : Mongabay Indonesia (2023)

Keberadaan hutan mangrove di Lantebung masih relatif luas serta letaknya yang strategis sebagai destinasi wisata alam. Potensi mangrove yang ada membuat Lantebung menerima penghargaan Kalpataru dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2020. Pada tahun 2023 juga Kawasan tersebut masuk kedalam daftar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (ADMINDISPAR, 2023)

Program ekowisata mangrove di Lantebung dikelola secara kolaboratif oleh beberapa aktor, termasuk pemerintah daerah, kelompok masyarakat pengelola, akademisi, serta organisasi non-pemerintah. Dalam pengembangan ekowisata mangrove di Lantebung dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial dan sudah disempurnakan oleh Permen LHK No. 9 Tahun 2021 (BPK, 2021), bahwa peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi masyarakat lokal untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan kawasan hutan secara lestari melalui skema perhutanan sosial, seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, atau Kemitraan Kehutanan. Dalam konteks kawasan mangrove, Permen ini memungkinkan masyarakat pesisir seperti di Lantebung untuk secara legal dan partisipatif mengelola ekosistem mangrove demi tujuan konservasi sekaligus peningkatan ekonomi berbasis wisata alam. Melalui regulasi tersebut, kolaborasi antarwarga, pemerintah, dan pihak lain (seperti LSM atau akademisi) dalam mengembangkan ekowisata mangrove menjadi lebih terstruktur dan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Selain itu, peraturan ini juga mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga sumber daya hutan sembari mengembangkan potensi ekonomi lokal, yang menjadi inti dari pendekatan kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan potensi sumber daya secara bersama dalam hal ini pengelolaan ekowisata mangrove menjadi hal yang penting dan mendukung pencapaian tujuan. Widiartanto et al (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komitmen, partisipasi dan tindakan bersama di antara berbagai pihak berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan ekowisata mangrove di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah (Widiartanto et al., 2022). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Insainia (2025) bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komunikasi, dialog dan aksi bersama (*collective action*) terhadap keberlanjutan dalam pengelolaan ekowisata mangrove di sekitar pesisir teluk Jakarta (Isnaini et al., 2025).

Penelitian diatas menyoroti pentingnya kolaborasi dan aksi kolektif dalam pengelolaan ekowisata mangrove, akan tetapi konteks dan fokus penelitian sebetulnya memiliki perbedaan yang signifikan. Penelitian tersebut lebih menekankan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari pengelolaan yang telah berjalan, dengan orientasi pada efektivitas kolaborasi multi-aktor dalam konteks yang relatif mapan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada aksi kolektif (*collective action*) dalam tahap pengembangan ekowisata mangrove, bukan hanya pada pengelolaan berkelanjutan

Pengembangan program ekowisata mangrove di Lantebung kota Makassar merupakan hasil dari keterlibatan berbagai aktor seperti masyarakat lokal, pemerintah, serta NGO, Proses kolaboratif ini mencerminkan suatu bentuk tindakan kolektif (*collective action*) yang tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, dinamika sosial, dan kelembagaan. Namun, sejauh mana para aktor tersebut mampu membangun kesamaan definisi masalah, menciptakan rasa saling percaya, serta melakukan koordinasi dan kontrol terhadap program masih menjadi pertanyaan penting. Selain itu, bagaimana proses mobilisasi aktor berlangsung dan peran peristiwa-peristiwa pemicu dalam membentuk aksi kolektif juga perlu diklaim. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis terkait tindakan bersama (*collective action*) dalam pengelolaan ekowisata mangrove di Lantebung. Berangkat dari pertanyaan pokok yaitu bagaimana tindakan *collective action* yang terjadi dalam pengembangan program ekowisata mangrove di Lantebung kota Makassar?

1.2 Tinjauan Teori

Saling ketergantungan pada perkembangan masyarakat modern, serta saling keterkaitan baik antara individu, kelompok maupun organisasi sangatlah tinggi. hal ini kemudian yang mendorong individu, kelompok serta organisasi, baik pemerintah ataupun swasta memiliki kecenderungan untuk merubah bentuk organisasi yang hirarki tradisional ke bentuk hubungan organisasi baru berupa jaringan kebijakan atau analisis yang strategis dalam bentuk kerjasama tertentu dalam penyelenggaraan kebijakan publik (Gedeona et al., 2013). Dalam perspektif jaringan, pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor tunggal (*single actor*).

Pemerintah dituntut mampu membangun jaringan antar-aktor dalam setiap pembuatan kebijakan publik. Aktor yang dimaksud dapat berupa individu maupun institusi (organisasi). Pendekatan jejaring (*network approach*) dalam kebijakan publik, mengalami perkembangan pesat dengan pertumbuhan organisasi cluster dan quango sebagai hasil interaksi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Jejaring kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan.

Perspektif jaringan didasari pada asumsi bahwa relasi para aktor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (*interdependence*). Dalam makna yang lebih operasional, bisa dimengerti para aktor tidak bakal mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan sumber daya- sumber daya yang dimiliki oleh aktor (Pratikno, 2008). Jaringan kebijakan berfokus pada hubungan dengan pemerintah dan ketergantungan pada aktor-aktor negara maupun aktor masyarakat lainnya. ditekankan jika hubungan struktural antara lembaga- lembaga politik sebagai elemen penting dalam jaringan kebijakan dari pada hubungan interpersonal antar individu dalam lembaga-lembaga tersebut. Jaringan kebijakan memfasilitasi koordinasi kepentingan publik dan swasta, serta sumber daya, dalam hal ini dapat meningkatkan efisiensi dalam implementasi kebijakan publik.

Sebagai hal yang tak terpisahkannya hubungan antar disiplin ilmu, sehingga kebijakan publik pun harus dikaji pula dari pendekatan teori-teori organisasi yang berasal dari disiplin organisasi. Sementara itu munculnya pendekatan tindakan kolektif dalam studi kebijakan publik karena para ahli melalui berbagai penelitiannya menemukan bahwa selama ini khususnya di negara-negara ke tiga, termasuk Indonesia aktivitas kebijakan sangat sarat dengan dominasi peran pemerintah, dari perencanaan, formulasi, implementasi, sampai pada tahap evaluasi kebijakan, dan memberikan tempat, peran serta entitas publik atau masyarakat lainnya (Gedeona et al., 2013). Pada tataran implementasi kebijakan sangat membutuhkan adanya kerja sama dan koordinasi dari beberapa organisasi atau bagian dari organisasi.

Implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan undang-undang, yang mempunyai makna pelaksanaan undang-undang disepakati dan dilaksanakan oleh berbagai aktor, sumber sumber daya organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan maupun program-program (Lester, 2000). Keberhasilan implementasi kebijakan sangat di pengaruhi oleh hubungan antar organisasi yang saling bekerja sama dan bertukar sumber daya. Sehingga jaringan implementasi kebijakan publik merupakan suatu studi yang memfokuskan pada pemanfaatan sumber sumber daya secara bersama sama oleh para pemangku kepentingan.

Berlatar belakang dari permasalahan tersebut dan berangkat dari banyaknya kritik yang ditujukan kepada pendekatan *Conventional Steering Perspective* dalam studi kebijakan, pada akhirnya memunculkan pendekatan proses dalam studi

kebijakan (Gedeona et al., 2013). proses kebijakan merupakan interaksi yang tak terelakkan dari berbagai aktor di lingkungan masalah kebijakan. Sehingga lahir pendekatan proses dalam studi kebijakan tersebut yaitu pendekatan tindakan kolektif dalam kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah Olson (1965), Russel Hardin (1982), Bamberg (2015), dan Carlsson (2000)

Ide-ide yang bermula dari Hobbes, Locke, dan Rousseau, asal-usul modern teori *Collective action* pertama kali ditemukan dalam tulisan Olson (1965) yang mempertanyakan bagaimana dan mengapa individu memutuskan untuk bekerjasama sebagai sebuah kelompok, mengingat bahwa kepentingan pribadi individu sering kali tidak sejalan dengan kepentingan *collective* yang lebih luas. Keputusan untuk bekerjasama bergantung pada faktor, termasuk ukuran kelompok; heterogenitasnya; kepercayaan dan timbal balik yang ada dalam kelompok (Demarrais & Earle, 2017). Dalam pandangan Olson proses kebijakan baik formulasi maupun implementasi kebijakan adalah hasil interaksi yang tak terelakkan di antara pluralitas aktor dengan kepentingan, tujuan dan strategi yang berlainan dalam suatu jaringan antar-organisasi dimana suatu urusan atau masalah publik tertentu diintervensi (Kickert et al., 1997). Adapun aktor yang dimaksud disini adalah pemerintah (organisasi publik), kemudian kelompok kepentingan, partai, kelompok sosial, dunia usaha (organisasi swasta) dan entitas-entitas lain dalam masyarakat serta warga-masyarakat itu sendiri atau perorangan. Aktor-aktor tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya sesuai keterkaitan dan peran yang ia mainkan dalam memecahkan masalah tersebut. Adapun seberapa besar perannya atau pentingnya aktor tersebut tergantung pada sumber daya yang ia miliki dan seberapa penting sumber daya tersebut dalam mengatasi urusan atau masalah publik tersebut.

Berbeda dengan Russel Hardin (1982) teori tindakan kolektif (*collective action*) yang dikembangkan oleh Russell Hardin memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat terhadap suatu kepentingan bersama. Hardin memandang tindakan kolektif sebagai masalah strategis yang terjadi ketika individu dalam kelompok memiliki kepentingan yang sama, tetapi masing-masing memiliki insentif untuk tidak bertindak karena dapat tetap memperoleh manfaat tanpa harus berkontribusi secara langsung. Fenomena tersebut dikenal sebagai *free rider problem* (Hardin, 2015). Singkatnya Hardin mendefinisikan tindakan *collective* sebagai suatu situasi di mana sekelompok individu memiliki kepentingan bersama untuk mencapai suatu tujuan kolektif, namun terdapat insentif individual untuk tidak berpartisipasi karena mereka tetap bisa menikmati hasilnya tanpa ikut berkontribusi (*free rider*).

Collective action merupakan teori yang berkembang pada perspektif policy network atau jaringan kebijakan. *Collective action* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan sekelompok individu dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi dari kelompoknya. Selain memperbaiki kondisi, tindakan *collective action* juga mampu meningkatkan status kelompok tersebut dari kelompok yang lain, (Tajfel and J. C. Turner, 1979). menambahkan bahwa kesamaan budaya dari suatu kelompok diklaim

sebagai latar belakang dari munculnya tindakan yang dilakukan kelompok secara massal.

Selama beberapa dekade terakhir, semakin banyak literatur tentang aksi kolektif (*collective action*), dengan penekanan besar pada konseptualisasi aksi kolektif dan pada kerangka analitis yang diperlukan untuk mempelajarinya. Dalam rangka mewujudkan tindakan kolektif maka (Bamberg et al., 2015) menyebutkan ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhinya:

1. *The Cost-Benefit Pathway* / Jalur Untung Rugi Hal ini merujuk pada keuntungan dan kerugian seseorang jika melakukan suatu tindakan, baik individu maupun secara kolektif. Individu akan memperhitungkan dari setiap langkah yang mungkin akan dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan didapat jika melakukan ataupun tidak tindakan tersebut dan kerugian jika melakukan ataupun tidak melakukan tindakan tersebut.
2. *The Collective Efficacy Pathway* / Jalur Efikasi Kolektif. Hal ini merujuk pada keyakinan individu menghadapi tekanan- tekanan yang berasal dari lingkungan sosialnya. Dengan keyakinan diri tersebut, individu akan memberikan respon untuk ikut serta dalam tindakan yang akan dilakukan kelompoknya atau tidak. Dengan kata lain, individu akan memproses segala informasi dari lingkungan yang kemudian memberikan motivasi untuk keikutsertaannya atau tidak terhadap tindakan kolektif tersebut.
3. *The Group-Based Emotions Pathway* / Jalur Emosi Kelompok. Hal ini merujuk pada kuat tidaknya pengaruh yang diberikan kelompok kepada individu untuk turut serta melakukan tindakan yang dilakukan secara kolektif. Pengaruh yang diberikan kelompok tersebut tentu akan mempengaruhi proses kognisi dan afektif dari seorang individu untuk mempertimbangkan keikutsertaannya dalam melakukan tindakan secara kolektif.
4. *The Social Identity Pathway* / Jalur Identitas Sosial. Hal ini merujuk pada keterikatan individu terhadap kelompoknya. Semakin kuat keterikatan individu dalam suatu kelompok, maka kemungkinan yang terjadi individu tersebut akan turut serta dalam melakukan tindakan secara kolektif dengan tujuan sebagai respon menyikapi suatu situasi.
5. *Different Contexts: Implications For The Current Research Program* Hal ini merujuk bahwa tindakan kolektif mengikat pada status sosial yang sama. Jika ada suatu program yang datang mengarah pada kelompoknya, maka didalam anggota kelompok tersebut tidak lagi menganggap bahwa “saya” adalah “saya”, melainkan menggantikan dengan “kami” atau “kita”. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keterikatan individu terhadap kelompoknya untuk merespon situasi yang mungkin akan mempengaruhi kelompoknya. Menurutny, individu yang tergabung dalam suatu kelompok akan melewati langkah tersebut baik secara sadar ataupun tidak sebelum akhirnya memutuskan untuk terlibat atau tidak dalam tindakan kolektif yang dilakukan kelompoknya.

Adapun Carlsson (2000) dalam tulisannya dijelaskan bahwa konsep *collective action* secara umum didefinisikan sebagai "tindakan yang diambil oleh anggota suatu kelompok untuk memajukan kepentingan bersama" Dalam teori *Collective Action*" yang dilihat adalah bagaimana hubungan antara tingkat koordinasi (*coordination*) di antara para pelaku (aktor), dan sejauh mana kepentingan mereka bersama (*Common Interest*). Dalam terminologi *collective action*, hal ini dipahami sebagai tindakan kolektif aktor atau pemangku kepentingan dalam studi kebijakan publik (Carlsson, 2000).

Hal tersebut menjadi landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Lebih lanjut dikatakan oleh Carlsson bahwa *collective action* menekankan pada 6 (enam) dimensi yang meliputi dimensi faktor kontekstual, definisi masalah, dimensi pertumbuhan dan kepercayaan, faktor presipitasi, mobilisasi aktor dan koordinasi dan kontrol. (Carlsson, 2000)

1. Faktor Kontekstual.

Faktor kontekstual dianggap sebagai dasar dari semua jenis tindakan kolektif. Istilah ini mengacu pada berbagai jenis faktor seperti sistem kepercayaan, sumber daya dan lain-lain. Keadaan ini memang akan berbeda-beda antar masyarakat, kelompok, dan tempat. Sebagai contoh, pembuatan kebijakan bergantung pada kondisi lokal dan lingkungannya. oleh karena itu sumber daya yang tersedia bergantung pada kondisi sebuah daerah, begitu juga sistem kepercayaan mempengaruhi metode pembuatan kebijakan.

2. Definisi masalah.

Jaringan dibentuk atas dasar beberapa "masalah" yang harus dipecahkan. Pemangku kepentingan atau aktor harus setuju bahwa terdapat masalah yang mesti diselesaikan. Karena dengan adanya masalah, maka akan menimbulkan *collective action* dalam memecahkan masalah yang telah ditetapkan oleh mereka. Misalnya para aktor yang terlibat dalam menyelesaikan masalah publik (jaringan kebijakan) setuju tentang jenis "masalah" apa yang harus diselesaikan? Apakah mereka berbicara tentang masalah yang sama, dan, jika demikian, apakah itu diberi label yang sama oleh masing- masing aktor? Dengan demikian, gagasan "masalah" tidak hanya mengacu pada masalah substansial yang dimiliki aktor, tetapi juga pada kebutuhan, tantangan yang dihadapi oleh aktor.

3. Pertumbuhan dan Penyebaran Keyakinan Umum.

Tindakan kolektif didasarkan pada beberapa pemahaman di antara para aktor (dalam jaringan) mengenai jenis tindakan mana yang dianggap baik, buruk, dapat diterima, atau tidak diterima oleh seluruh pemangku kepentingan atau aktor. Dengan demikian, dibutuhkan pemahaman, saling pengertian dan keyakinan bersama oleh para aktor dalam upaya untuk memilih tindakan kolektif yang akan dilaksanakan.

4. Faktor Precipitation / Faktor Pemicu

Tindakan kolektif dan karenanya, pembuatan kebijakan tidak dipicu secara otomatis. Cara khas untuk memicu kegiatan pembuatan kebijakan adalah dengan membuat keputusan politik; misalnya, peluncuran program kebijakan, tetapi mekanisme ini tidak begitu jelas seperti yang terlihat. Jaringan kebijakan mungkin berkembang sebagai akibat dari keputusan politik tertentu, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh studi empiris, banyak jaringan tidak memiliki asal-usul ini. Akibatnya, keputusan politik hanyalah salah satu metode untuk memicu tindakan kolektif, dan, terlebih lagi, bahkan jika keputusan politik diambil, hasilnya adalah tidak ada tindakan yang akan terjadi.

5. Mobilisasi Aktor.

Karena sebagian besar kompleksnya masalah, dalam arti bahwa tidak ada solusi tunggal (*single organization*) yang dapat menyelesaikannya, maka jalan lain untuk melibatkan berbagai aktor menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah alasan mengapa kita memiliki jaringan kebijakan. Mobilisasi aktor adalah salah satu kegiatan penting dalam proses membangun jaringan. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Beberapa aktor mungkin mengambil peran sebagai "penggerak" formal. Misalnya, mereka yang bertanggung jawab atas pemenuhan program kebijakan dapat membujuk, atau membuat, aktor lain berkontribusi pada implementasi program, sehingga menciptakan jaringan implementasi. Dimungkinkan juga untuk mengidentifikasi bentuk mobilisasi lain yang lebih spontan. Orang-orang dapat, seperti yang ditunjukkan di atas, mengatur diri mereka sendiri untuk menyelesaikan beberapa masalah yang mereka anggap mendesak. Banyak jaringan terbentuk dengan cara ini, yaitu, tanpa ada yang bertanggung jawab atas mobilisasi aktor yang sebenarnya.

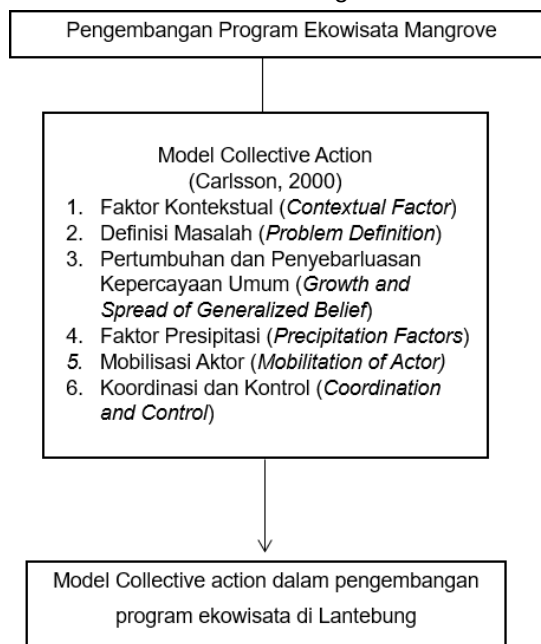
6. Koordinasi dan Kontrol. Setiap contoh tindakan kolektif tunduk pada kontrol sosial. Dalam proses pembuatan kebijakan, otoritas administrasi politik sering merancang pengaturan khusus untuk melaksanakan kontrol formal atas kegiatan dan sumber daya. Hal yang sama berlaku untuk organisasi lain yang mungkin menyediakan aktor untuk jaringan. Kontrol sosial terkait erat dengan koordinasi. Dengan demikian, kontrol dapat dianggap sebagai mekanisme dalam satu individu, atau sebagai muncul dari proses interaksi antara individu.

Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan teori *Collective Action* dari Carlsson (2000) karena pendekatan ini secara komprehensif mampu menjelaskan dinamika kolaborasi antar aktor dalam konteks pengembangan program ekowisata mangrove di Lantebung kota Makassar, yang bersifat kompleks, lintas sektor, dan berbasis masyarakat. Teori Carlsson menawarkan enam elemen utama yaitu faktor kontekstual, definisi masalah, dimensi pertumbuhan dan kepercayaan, faktor presipitasi, mobilisasi aktor, serta koordinasi dan kontrol yang sangat relevan dalam memetakan bagaimana kerja sama antara warga, pemerintah, komunitas lokal, dan organisasi. Berbeda dengan teori *collective action* klasik dari Mancur Olson

(1965) yang lebih berorientasi pada kalkulasi insentif pribadi dan problem *free rider*, pendekatan Carlsson lebih aplikatif untuk memahami dinamika sosial dan institusional yang terjadi dalam program berbasis partisipasi komunitas.

Demikian pula, teori dari Russell Hardin yang menitikberatkan pada *trust* hanya mencakup sebagian kecil aspek dari proses kolektif yang terjadi di lapangan, tanpa menguraikan proses pembentukan koalisi atau koordinasi antar aktor. Sedangkan pendekatan psikologis dari Bamberg lebih cocok untuk konteks perilaku individu, dan kurang mampu menangkap kompleksitas kolaborasi multi-aktor dalam setting kebijakan publik. Oleh karena itu, teori Carlsson dipandang paling tepat untuk menelaah bagaimana proses kolektif terbentuk dalam konteks pengembangan ekowisata mangrove, mulai dari pembentukan kesadaran bersama, mobilisasi sumber daya sosial, hingga penguatan mekanisme koordinasi antar aktor.

Gambar 2 Kerangka Pikir



1.3 Tinjauan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tindakan bersama pada program ekowisata lantebung dengan menggunakan dimensi pada model *collective action* pada Carlsson (2000).

1.3.2 Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian studi administrasi publik yang berkaitan dengan model *collective action*, khususnya pada management ekowisata.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu saran dan masukan bagi berbagai pihak terkait, khususnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan ekowisata mangrove.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Creswell (2018) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami secara komprehensif dan mengeksplorasi fenomena yang ingin diteliti (Creswell, 2018).

2.2 Desain Penelitian

Terdapat berbagai desain penelitian yang dapat digunakan dalam pendekatan kualitatif seperti studi kasus (*case study*), fenomenologi, etnografi dan *grounded theory*. Adapun penelitian ini menggunakan desain studi kasus (*case study*), dimana desain ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara komprehensif dan mendalam terkait fenomena yang diteliti, dalam hal ini manajemen program ekowisata.

Dalam desain penelitian studi kasus, peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap suatu peristiwa atau proses yang terjadi dari satu atau lebih individu. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus juga memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara mendalam dan mengumpulkan informasi terperinci dalam batasan waktu atau aktivitas tertentu. Data dan informasi yang dikumpulkan kemudian di analisis untuk diuraikan secara deskriptif.

2.3 Prosedur Penelitian

2.3.1 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan masalah yang diteliti. Pemilihan informan didasarkan pada relevansi, kepercayaan terhadap sumber informasi, serta keterlibatan mereka dalam kegiatan yang diteliti. Informan dipilih secara purposif, yaitu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang fenomena yang dikaji. Informasi dari para informan diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai kondisi penelitian. Oleh karena hal tersebut perlu diketahui informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah informan sebagai berikut:

Table 2 Daftar Informan

Informan	Jabatan/Instansi	Jumlah
Khairil Amri	Fungsional kepariwisataan ahli muda/Dinas Pariwisata Kota Makassar, Bidang Destinasi Pariwisata	1
Novi Narilla	Fungsional pengendali dampak lingkungan ahli muda/Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Bidang Ruang Terbuka Hijau	1
Cici	Kepala bidang pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau pulau kecil/Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	1
Andi Zakaria Razak	Lurah/Lurah Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea	1
Nuryamin	Koordinator Program Mangrove/Yayasan Konservasi Laut	1
Rumallang	Pak Imam sekaligus Anggota Jekomala	1
Busran & Abdul Muin	Anggota Jekomala sekaligus Masyarakat lokal yang melakukan monitoring dan pemeliharaan mangrove	2

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, (Creswell, 2018) menyebut terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen.

1. Observasi

Observasi merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan. Cara ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait sikap/tindakan, perkataan/pembicaraan, interaksi dan kondisi lingkungan yang ada pada objek dan lokasi penelitian. Observasi langsung dilakukan pada Lokasi ekowisata mangrove di lantebung.

2. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada informan penelitian. Data-data yang dikumpulkan dalam wawancara bersifat deskriptif, persepsi, pendapat, perasaan, keyakinan dan pengalaman dari informan dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berbagai informasi dari informan-informan yang ada, yang kemudian dapat dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Dalam konteks ini, peneliti akan menyusun instrumen wawancara yang memuat daftar pertanyaan bagi para informan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen menjadi salah satu metode pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai dokumen terkait dan relevan untuk menjadi data sekunder penelitian dan kemudian dapat di analisis lebih lanjut dan di elaborasi dengan hasil wawancara terhadap informan. Hal ini dilakukan agar hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti lebih kaya, argumentatif dan juga kredibel.

2.3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang dilakukan dalam memahami, menginterpretasikan dan menganalisis berbagai data dan informasi yang telah dikumpulkan. Terdapat beberapa teknik analisis data yang dapat dilakukan, diantaranya mengatur dan mempersiapkan data, membaca dan memahami data, mengkodekan data/kodifikasi data, dan interpretasi makna (Creswell, 2018).

1. Mengatur dan mempersiapkan data (*Organizing and preparing data*): dimaksudkan sebagai langkah dimana peneliti mengumpulkan berbagai hasil transkripsi wawancara dengan informan penelitian dan juga mengumpulkan berbagai data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen terkait untuk diatur berdasarkan jenis datanya.
2. Membaca dan memahami data (*Reading through all data*): langkah ini dilakukan dengan membaca untuk memahami keseluruhan data yang telah ada untuk di refleksikan. Proses ini juga mencakup pengumpulan berbagai data dan informasi kunci yang diperoleh, pengecekan kredibilitas data dan penggunaan informasi.

3. Mengkodekan data/kodifikasi data (*Coding the data*): proses ini dilakukan dengan memberi kode berbagai data dan informasi berdasarkan pengkategorisasian tertentu untuk kemudian diberi catatan terkait data tersebut.
4. Menginterpretasikan makna tema/deskripsi (*Interpreting the meaning of themes/description*) : menjadi langkah terakhir dalam proses analisis data, dimana peneliti melakukan interpretasi terhadap berbagai data dan informasi yang telah ada.

2.3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas data merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keakuratan data, kredibilitas data dan temuan penelitian dengan beberapa cara. Dalam konteks penelitian ini, validitas data dilakukan dengan *member checking* yaitu melakukan konfirmasi kepada informan kunci terkait data dan temuan yang telah dianalisis. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat dan mengkonfirmasi keakuratan temuan penelitian berdasarkan data yang ditemukan.

Adapun reliabilitas data merupakan tahap dimana peneliti memastikan konsistensi data dan hasil yang diperoleh dengan pengukuran yang sama. Dalam konteks penelitian ini, pengukuran reliabilitas data dilakukan dengan memeriksa dan mengecek kembali hasil transkripsi wawancara untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam proses transkripsi.